

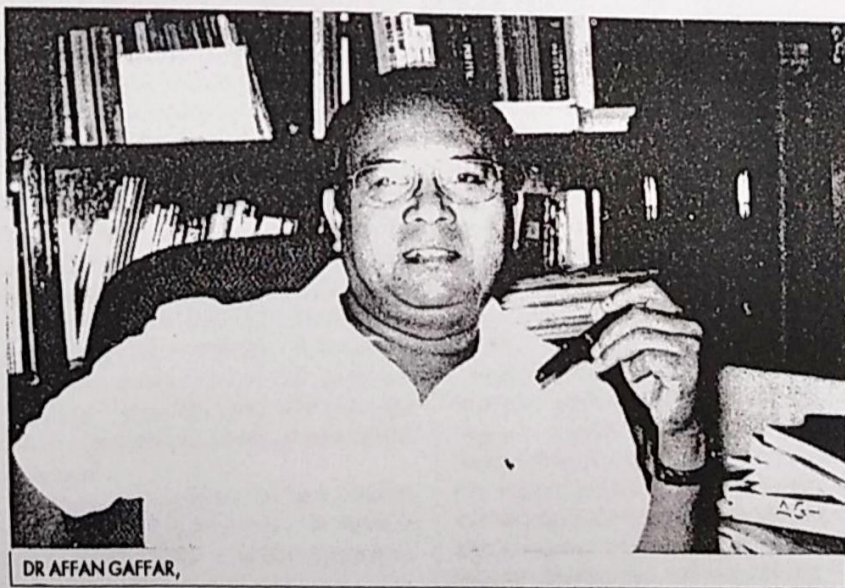
perbedaan umat Islam dengan yang lain. Bambang mengharapkan adanya suatu keharusan bagi lembaga-lembaga Islam harus menyebarkan pedoman-pedoman sederhana tentang marketing, usaha kecil, usaha menengah, dll. Demikian pula dalam aspek permodalan harus dipermudah, disamping umat ditingkatkan ilmu dagangnya. Kita ajak seluruh umat terjun di bidang ekonomi tanpa terlalu ketat menyeleksi bidang dan cara usahanya terlebih dahulu. Apapun profesi utamanya, baik guru, da'i, pegawai negeri, dll. harus ada usaha sampingannya yang berbentuk perdagangan (wiraswasta). Jangan dulu ditakut-takuti dengan hukum yang ketat, yang penting mau dulu agar roda perekonomian umat berputar. Sebagaimana Bambang, Dr. M. Amien Rais pun menilai bahwa ketakutan pelanggaran syar'i dan keagamaan, terutama bunga bank, seringkali menyelimuti pikiran umat, yang akhirnya disikapi dengan tidak jelas dan menghalangi kemajuan. Sehingga, lanjut Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, ketika kelompok masyarakat Indonesia yang lain itu dengan cepat menggunakan jasa bank, umumnya para pengusaha muslim ragu-ragu. Padahal, kita mengetahui bahwa ekonomi modern tanpa bank itu tak bisa digambarkan, *unthinkable*.

Namun, menurut Bambang, sejalan dengan adanya kebebasan berwirausaha itu harus ada sekelompok orang yang menggodok aturan-aturan yang aplikatif (dapat diterapkan) dalam rangka mewujudkan ekonomi yang Islami. Kelompok ini selain terdiri dari para ulama ahli fiqih, juga harus disertai para praktisi (pengusaha) di lapangan, agar aturan-aturannya dapat diterapkan pada kenyataan saat ini. Namun para pelaku ekonomi di lapangan pun jangan enak-enak saja, mentang-mentang belum ada aturan baku dari hukum Islam dalam bisnis modern, menganggap semua cara menjadi halal. Dalam masa transisi sebelum dirumuskan dan diterapkannya aturan Islam di bidang ekonomi modern, harus ada apa yang disebut "subsidi silang" dari para pengusaha. Para pengusaha harus banyak-banyak menginfakkan hartanya di jalan yang maslahat. Demikian pula mereka harus banyak mengkaji Islam, ikut majelis ta'lim, lebih banyak ibadah dan bertaqarrub pada Allah Swt.

Wallahu 'Alam. □ MTR: PO, FM, AH, SP.

Kewirausahaan dalam Keindonesiaan

Kewirausahaan di Indonesia telah ada sejak dulu. Dan setelah masuknya Islam ke sini, kegiatan kewirausahaan itu semakin marak. Dan bahkan pada zaman penjajahan, menjadi alat perjuangan bangsa ini untuk mencapai kemerdekaannya. Namun, sejarah ternyata tidak bergulir lurus. Ada banyak dinamika dalam masalah kewirausahaan umat Islam di negeri ini. RISALAH sempat menghubungi beberapa tokoh yang meninjau kewirausahaan di negeri kita ini dari berbagai aspek. Berikut kami sajikan untuk anda.



DR AFFAN GAFFAR,

Berbagai segi ada dalam masalah kewirausahaan di negeri kita ini. Sehingga dapat disebut sebagai sebuah problematika yang rumit dan kompleks. Tulisan hasil dari beberapa wawancara ini memuat kondisi kesejarahan, pergeseran-pergeseran kekuatan, hambatan-hambatan, dan keterlibatan pemerintah.

Wirausaha sebagai anugerah sejarah

Tidak berlebihan jika ada ungkapan bahwa kewirausahaan adalah anugerah yang datang yang bersamaan dengan datangnya Islam di negeri ini. Atau dapat pula sebaliknya, Islam merupakan rahmat yang datang bersamaan dengan datangnya para pedagang muslim dari berbagai jihat. Sebab,



DR. DJOKO SURYO

data sejarah memang tidak dapat berbicara lain di negeri ini. Agaknya ajaran sejarah ini telah tertanam di lubuk hati masyarakat Indonesia.

Sebenarnya, menurut H. Guntur Salahudin, Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur, pada mulanya para pedagang muslim itu tidak bermaksud secara langsung berda'wah di negeri ini. H. Guntur mencontohkan kasus di Kalimantan Tengah. Karena para pedagang perlu menginap beberapa saat di sekitar pantai, maka ketika mereka (para pedagang) itu tinggal, mereka pun membutuhkan tempat shalat, dibangunlah mushalla sehingga mushalla menjadi banyak. Mulailah terdengar suara adzan. Di sinilah muncul syiar Islam itu. Jadi dengan demikian, pada dasarnya para pedagang itu tidak menyebarkan agama Islam. Melainkan karena orang-orang pribumi itu tertarik oleh suara adzan dan perilaku umat Islam sehingga pada akhirnya mereka masuk Islam.

Begitulah sejarah Islam bermula di sini. Sebuah bingkai sejarah yang cukup unik dan simpatik. Karena orang-orang pribumi masuk Islam dengan cara damai. Sedang kemampuan masyarakat pribumi pun bertambah, dari yang sekedar mengandalkan pertanian, kemudian bertambah dengan timbulnya jiwa kewirausahaan dan berkembangnya sistem perdagangan internasional.

Namun, perkembangan yang begitu pesat itu terkandaskan dengan datangnya

penjajah Belanda dan Portugis yang berdagang dan menyebarkan agama dengan cara peperangan. Dan kita pun kalah. Maka kita pun terjajah, termasuk dalam bidang perekonomian. VOC, serikat dagangnya Belanda, menguasai monopoli perdagangan. Sedangkan kaum pribumi terpuruk menjadi kelas tiga yang lebih jelek perlakuan ekonomi, sosial, dan politiknya daripada orang-orang Timur Asing (Arab, India, dan terutama Cina) yang diperlakukan secara baik oleh penjajah Belanda.

Dari kondisi seperti itu lahirlah Syarikat Dagang Islam (SDI). Menurut Dr. Djoko Suryo, Dekan Fakultas Sastra UGM, lahirnya SDI pada awal abad ke-20-an ini berawal dari kelompok pengusaha, para pedagang Islam. Waktu itu ada kesadaran dari para wirasusaha pribumi untuk mereaksi kemapanan pengusaha Barat kolonial dan golongan menengah Timur Cina yang sudah beberapa waktu mendominasi sektor perekonomian menengah.

Namun, sejalan dengan itu, kaum pribumi tidak hanya mempunyai kesadaran berwirasusaha. Maka timbullah pergeseran-pergeseran kekuatan.

Pergeseran Kekuatan

Meluruhnya kewirausahaan umat, selain karena "dikebiri" oleh penjajah, juga karena banyak orang-orang pribumi yang menjadi pegawai Pemerintah Hindia Belanda. Menurut Djoko Suryo, yang ahli sejarah lulusan Monash University Australia ini, golongan menengah pribumi lain memiliki basis kegiatan kepamong-prajaan seperti jadi

Bupati, Wedana, Pegawai, dan lain-lain.

Kondisi ini ternyata membuat keterlanjuran mental, sehingga membuat umat terbuai dalam enaknya hidup menjadi pegawai. Dari situlah kemudian banyak sekolah didirikan. Maka, tidak lain —demikian H. Guntur— faktor yang menyebabkan pergeseran ini adalah adanya sistem pendidikan kita, di mana sistem pendidikan kita adalah belajar menyusun sebuah struktur organisasi, harus taat pada guru, ada administrasi, ada jam-jam sekolah dan juga ada ijazah. H. Guntur, pengusaha kayu berusia 46 tahun ini menjelaskan bahwa, dengan adanya hal-hal di ataslah kemudian terciptalah pola disiplin yang cukup ketat yang kecenderungannya membentuk doktrinitas. "Mekanisme ini kemudian mampu merubah perilaku mereka, sehingga setelah tamat sekolah, dia harus mengetrapkan pola disiplin yang selama ini diterima. Sedangkan pola-pola tersebut hanya ada dalam perusahaan dan pemerintahan," demikian H. Guntur. Ia juga menilai, bahwa dengan adanya ijazah, orang merasa tidak akan mempersulit dirinya. Dengan ijazah orang merasa lebih mudah untuk mencari pekerjaan daripada susah-susah berwirausaha yang belum tentu menghasilkan apalagi harus beresiko tinggi.

Maka adalah wajar manakala tokoh-tokoh Persatuan Islam (PERSIS) ketika memberi ijazah pesantren kepada santri-santrinya seringkali mengucapkan kata-kata "Semoga ijazah ini tidak laku". Demikian disebabkan, para pemuka PERSIS tidak ingin santrinya mempunyai ketergantungan kepada yang lain, terutama kepada Pemerintah. Karena, disadari akan adanya suatu kekakuan dalam berda'wah, apalagi dengan suara yang lantang.

Maraknya orang yang berorientasi kepada pekerjaan (terutama untuk menjadi pegawai negeri) inipun diakui oleh tokoh Muhammadiyah seperti Dr. A. Syafi'i Ma'arif. Ahli sejarah jebolan Chicago University AS ini mengakui bahwa pada waktu sekarang ini kepemimpinan Muhammadiyah dari pusat sampai daerah dan cabang-cabang itu sebagian besar (kurang lebih 70%) berada di tangan Pegawai Negeri dan Pensiunan. Kalau pada tahun 1950-an itu rata-rata yang memimpin Muhammadiyah itu para pedagang, orang yang merdeka. Syafi'i Ma'arif menyadari bahwa hal ini bukan berarti Pegawai Negeri tidak merdeka, tetapi kemerdekaan mereka sedikit banyak dibatasi, terutama ketika harus ada monoloyalitas dalam berpolitik.

Keterlibatan Pemerintah

Tetapi walaupun begitu kenyataannya, namun ada juga keuntungannya. Ketika ada di antara kaum pribumi yang berkuasa, tentu mereka tidak melupakan nasib kaumnya. Terbukti ketika diberlakukannya "Politik Benteng" di zaman Orde Lama, di mana Pemerintah berusaha memperkuat pribumi (pengusaha muslim) sebagai satu-satunya

demikian Amien Rais, Direktur Eksekutif PPSK Yogyakarta.

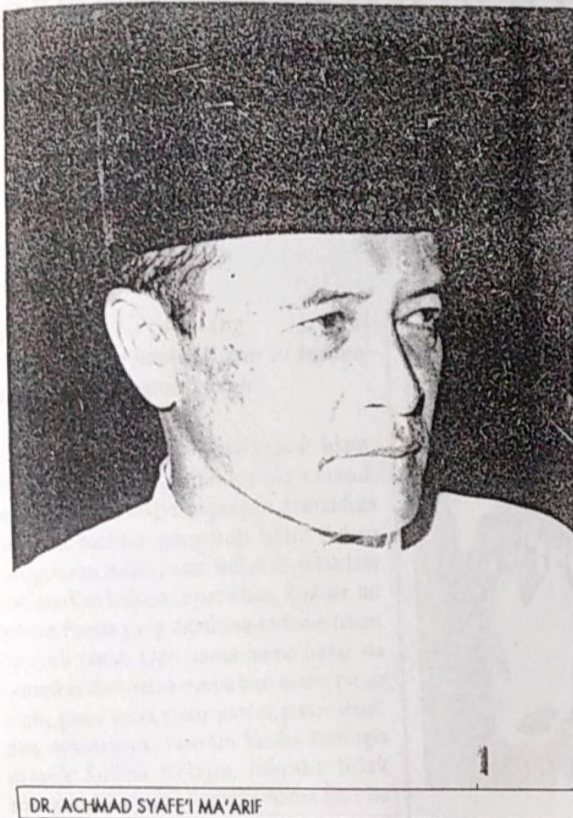
Akibatnya —tegas Djoko Suryo yang Dosen Jurusan Sejarah di UGM ini— setelah ekonomi liberal itu terbuka, ekonomi di lingkungan muslim tidak bisa tahan, luntur, dan sentra-sentra industri semuanya justru merosot. Sementara golongan Cina yang dulu sudah mantap jadi lebih mantap lagi, lebih ekspansif menduduki posisi-posisi perdagangan.

Keterlibatan Pemerintah memang dibutuhkan, tetapi tidak untuk membuat para pengusaha menjadi manja dan menjadikan masyarakat yang mendapat subsidi tidak meningkatkan kemampuan kewirausahaannya. Sebab, hal ini akan mengakibatkan kembalinya kecelakaan sejarah. Amien Rais mencontohkan hal ini pada Rusia dan negara-negara Eropa Timur yang walaupun telah berubah wajah politiknya dari wajah

bangsanya itu sangat menentukan. Amien sendiri melihat, bahwa dari segi Pemerintah kita sendiri tampaknya ada *policy* yang mungkin perlu diperbaiki untuk masa-masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan kata lain, demikian Dr. Affan Gaffar, ahli politik jebolan Ohio University, diperlukan adanya intervensi Pemerintah dalam pengertian menumbuh-suburkan wirausaha.

Namun, dengan adanya perhatian dan subsidi Pemerintah, ada pula timbal balik yang harus dibayar oleh para pengusaha, yaitu kesamaan visi politik. Djoko Suryo mengatakan bahwa kini, seolah-olah ada prasyarat, "Siapa yang ingin memiliki keleluasaan harus berkooptasi dan berkooperasi dengan Golkar, karena Golkar memiliki satu otoritas dan kekuasaan, dominasi dalam menguasai sektor-sektor kewirausahaan. Dr. Affan Gaffar, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM menyebut prasyarat demikian itu sebagai "koneksi politik".

Di satu sisi memang kewirausahaan membutuhkan kemandirian, tetapi di sisi lain diperlukan pula adanya intervensi Pemerintah. Maka, menurut Djoko Suryo, di sinilah perlunya kepekaan dan kebijaksanaan dari kalangan wirausaha dalam memilih kapan dia harus berafiliasi



DR. ACHMAD SYAFE'I MA'ARIF

yang memiliki posisi. Jadi —Syafi'i Ma'arif menegaskan— sesungguhnya, kalau kita mau jujur, keberhasilan (pada zaman Orla —red.) itu bukan karena kepintaran, tetapi lebih banyak karena subsidi itu.

Namun sejarah pun membuktikan bahwa Politik Benteng ini gagal. Masalahnya, demikian Djoko Suryo, gagalnya Politik Benteng itu karena waktu itu para wirausaha Islam belum sangat kuat kemampuannya untuk berkembang. Mereka baru tumbuh, mendapat kepercayaan dan fasilitas, tetapi tidak mampu mengembangkan, karena sumber daya manusia, wawasannya masih terbatas. "Kita memang belum siap dalam segi SDM, apalagi untuk berglobalisasi ekonomi."

otoriter menjadi lebih terbuka dan demokratis, tetapi usaha untuk memperbaiki kondisi ekonominya tidak mudah sama sekali.

Selanjutnya Amien berpendapat, bahwa untuk itu memang campur tangan pemerintah dalam mengarahkan ekonomi

dan kapan harus membuat jarak. Karena itu memang satu kesempatan untuk bisa bangun, *survive*. Jadi, sebenarnya tidak masalah berafiliasi dengan birokrasi untuk kemudian bisa mandiri, inilah yang disebut dengan *afiliasi selektif*.

□ MTR: FM, SP: MTR/IK

Syafi'i Ma'arif menegaskan, sesungguhnya,

kalau kita mau jujur, keberhasilan (pada zaman

Orla —red.) itu bukan karena kepintaran, tetapi

lebih banyak karena subsidi itu.